

Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara

Sonny Sudiar

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Mulawarman
Jalan Kuaro Kotak Pos 1068, Samarinda 75119, Indonesia
sonny.azzam.sudiar@gmail.com
Diserahkan: 30 Oktober 2018; diterima: 22 Maret 2019

Abstract

The study of state border have always been an interesting topic of discussion among the International Relations scholars, this is because the border issues are related to territorial issues and state sovereignty. So that discussions about state borders are always dominated by traditional security approaches that put the country as the primary actor. Meanwhile, this article seeks to use the human security approach in reviewing state border issues. This is done as a form of response to the dynamics of change in international relation. Unlike traditional security approaches that always put a state as the object of reference, the human security approach is focus on individual security. According to UNDP there are seven universal components in human security approach; economic, food, health, environment, personal, community, and political security.

Keywords: human security, state, border, international relations.

Abstrak

Studi perbatasan negara senantiasa menjadi tema diskusi menarik di antara kalangan ilmuwan Hubungan Internasional, hal tersebut dikarenakan isu perbatasan berkaitan dengan persoalan teritorial dan kedaulatan negara. Sehingga diskusi ini selalu didominasi oleh pendekatan keamanan tradisional yang meletakkan negara sebagai aktor utama. Sementara, artikel ini berupaya menggunakan pendekatan keamanan manusia dalam mengkaji isu perbatasan negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon terhadap dinamika perubahan dalam hubungan internasional. Tidak seperti pendekatan keamanan tradisional yang menjadikan negara sebagai objek rujukannya, pendekatan keamanan manusia adalah pendekatan yang berpusat pada keamanan individu. Merujuk pada UNDP, terdapat tujuh komponen universal dalam pendekatan keamanan manusia, yaitu: keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, individu, masyarakat, dan politik.

Kata kunci: keamanan manusia, negara, perbatasan, hubungan internasional.

PENDAHULUAN

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), isu perbatasan negara sering kali menjadi tema kajian yang sangat krusial, karena berkaitan dengan persoalan teritorial dan kedaulatan negara. Oleh karenanya, mayoritas penelitian tentang perbatasan selalu didominasi oleh pendekatan keamanan tradisional dengan meletakkan negara sebagai aktor sentralnya. Sehingga tidak jarang isu yang sering kali muncul apabila membahas perbatasan negara, umumnya selalu berkaitan dengan militerisasi dan konflik (Atzili, 2012; Bechev & Nicolaïdis, 2010; Coyle, 2018), termasuk juga perihal demarkasi teritorial serta aspek fisik yang menyertainya (Minghi, 1963; Prescott & Triggs, 2008).

Secara tradisional, studi HI menganggap perbatasan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari negara sebagai unit analisa utama. Perbatasan dianggap sesuatu yang terberi dan tidak bisa diganggu gugat keberadaannya. Terlebih ada pandangan yang menganggap bahwa perbatasan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara, maka dimensi keamanan akan sangat ditonjolkan dan

konsekuensinya adalah pengabaian pada dimensi sosial lain yang terkandung di dalamnya (Agnew, 1994; Paasi, 2005). Dengan demikian, studi tentang perbatasan negara masih banyak menyisakan ceruk untuk dieksplorasi lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan perbatasan dan kesejahteraan manusia.

Berbeda dengan mayoritas kajian perbatasan yang sudah ada, tulisan ini mengkaji perbatasan negara dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia (*human security*) yang meletakkan individu sebagai objek sasarannya (*referent object*). Hal ini karena tren pergeseran paradigma yang terjadi sejak beberapa dekade lalu telah membuka perdebatan mengenai aspek kemanusiaan yang seringkali terabaikan jika dihadapkan pada pendekatan tradisional yang lebih mementingkan dimensi fisik perbatasan serta keamanan dari sebuah negara.

Keamanan manusia sendiri merupakan varian dari studi pembangunan internasional yang menekankan pada kesejahteraan manusia secara holistik dan tidak hanya berfokus pada angka-angka statistik dari pembangunan yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan (Ackleson, 2005; Ajdari & Asgharpour, 2011; Busumtwi-Sam, 2008; Kester, 2017; Shibuya, 2016). Dengan mengintegrasikan berbagai literatur yang dikembangkan dalam studi HI mengenai keamanan manusia, maka studi tentang perbatasan berimplikasi pada penguatan menuju kajian yang semakin kaya serta semakin responsif terhadap keadaan manusia dan komunitas sosial yang tinggal dan menggantungkan hidupnya di wilayah perbatasan atau pada isu-isu yang menyertai perbatasan. Narasi berpikir di atas menegaskan bahwa tulisan ini menitikberatkan kajian pendekatan keamanan manusia dalam studi perbatasan negara.

PEMBAHASAN

STUDI PERBATASAN DALAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Studi HI menjadi sangat kompleks dan kaya akan telaah-telaah baru seiring perkembangan politik dunia. Kini, penstudi HI lazim mengenal pembagian isu berdasarkan periodisasinya yakni isu tradisional dan non-tradisional, di mana istilah isu tradisional merujuk pada fenomena-fenomena yang dahulu mendominasi bidang kajian ini seperti pembahasan tentang perang antarnegara berdaulat, perlombaan senjata militer, aliansi keamanan regional, sampai pada perimbangan kekuatan antara negara-negara utama dalam politik internasional. Sedangkan istilah isu non-tradisional merujuk pada hal-hal sangat luas yang berada di luar pengelompokan istilah yang pertama. Isu non-tradisional memiliki cakupan luas dimulai dari isu-isu seputar ekonomi seperti pertumbuhan, kemakmuran, ekspor-impor, kerja sama perdagangan regional, rezim perdagangan global, dan lain-lain. Kemudian ada pula isu yang berkaitan dengan sosial seperti hak asasi manusia, pelestarian warisan kebudayaan manusia, pendidikan, dan lain sebagainya. Di bidang lingkungan hidup, perhatian ditujukan kepada isu pemanasan global, pencemaran lingkungan, keberlangsungan satwa-satwa liar serta endemik, sampai pada keberagaman flora dan fauna dalam ekosistem.

Perkembangan isu-isu non-tradisional, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menyiratkan satu konsekuensi signifikan dalam kajian ilmu HI, yakni tentang pergeseran posisi sentral negara yang tidak lagi mendominasi fokus para ilmuwan HI baik sebagai subjek maupun objek penelitian. Adanya pergeseran fokus dari negara, membuat entitas-entitas terdahulu tidak terlalu diperhatikan dan berada pada margin diskursus ilmu HI, kini mulai disejajarkan dengan negara dalam kaitannya sebagai aktor HI. Aktor-aktor marjinal yang muncul ke tengah-tengah diskursus keilmuan HI saat ini bisa dilihat misalnya korporasi multinasional (MNCs), organisasi non-pemerintah internasional (INGO), pemerintah daerah, komunitas adat, sampai pada individu yang memiliki pengaruh besar dalam politik global.

Perkembangan isu dan aktor-aktor dalam kajian HI tentu saja membuat kompleks bidang ilmu ini. Kompleksitas yang dibawa tidak hanya dari penambahan isu serta aktor-aktor baru dalam diskursus HI,

namun juga pada posisi isu-isu lama yang harus disesuaikan dan ditelaah dengan alat analisis serta perspektif yang juga berkembang seiring dengan transformasi yang terjadi dalam kehidupan sosial. Penelaahan isu-isu tradisional dengan menggunakan pendekatan kontemporer seringkali menghasilkan sudut pandang baru dan berbeda dengan pendekatan yang biasa digunakan. Meski demikian, harus diakui bahwa tidak semua bidang kajian dalam ilmu HI bisa 'menerima' perubahan cara pandang tersebut. Beberapa bidang-bidang tertentu masih kental dengan elemen-elemen tradisional yang sulit untuk dihilangkan dalam pembahasannya. Salah satunya adalah bidang kajian perbatasan negara, atau lebih jelasnya perbatasan internasional.

Perbatasan internasional merupakan aspek penting dalam sebuah konsep negara yang dihasilkan oleh perjanjian Westphalia tahun 1648, karena perbatasan menentukan wilayah di mana suatu otoritas diimplementasikan sekaligus menjadi pembatas di mana otoritas tersebut berakhir. Selain itu, perbatasan juga merupakan aspek penting di mana kedaulatan negara bersinggungan dengan kedaulatan negara lain. Fenomena ini merupakan hal yang lumrah dijumpai di dunia modern saat konsep negara-bangsa Westphalia terproliferasi ke seluruh dunia sehingga hampir tidak ada lagi wilayah yang tidak berada di bawah otoritas negara-bangsa.

Salah satu perdebatan yang sangat menarik dalam diskursus HI adalah perdebatan tentang dampak globalisasi terhadap perbatasan internasional. Setidaknya, terdapat dua kubu dalam diskursus mengenai perbatasan dalam kaitannya dengan globalisasi. Kubu pertama adalah mereka yang skeptis akan signifikansi perbatasan, bahkan mereka lebih lanjut menggugat otoritas serta relevansi dari konsep negara-bangsa Westphalia yang melahirkan konsep perbatasan itu sendiri (Castells, 2010a, 2010b, 2010c; Hammarlund, 2005; R. O'Brien, 1992; Ohmae, 1995, 2005). Sedangkan bagi kubu lainnya, perbatasan masih merupakan hal yang relevan dalam HI, mereka berpendapat bahwa sampai saat ini konsep negara-bangsa Westphalia, suka atau tidak, harus diakui sebagai konsep yang masih memiliki pengaruh sangat kuat dalam kehidupan manusia dan kelompoknya (Albert & Brock, 2001; Anderson, 1996; Clad, 2011; Diener & Hagen, 2010; Goemans, 2006; Newman, 2001; van Houtum, Kramsch, & Zierhofer, 2005).

Selain perdebatan besar mengenai dampak globalisasi terhadap perbatasan ada pula tulisan-tulisan akademisi lain yang berpusat pada tema perbatasan yang berkaitan dengan kedaulatan (Jones *et al.*, 2017; Shneiderman, 2013), kaitan antara perbatasan dan kerja sama internasional (Aker *et al.*, 2014; Castanho *et al.*, 2017; Hayakawa, 2017; Medeiros, 2017), konstruksi perbatasan baik pada dimensi fisik maupun normatif seperti pada persepsi masyarakat (Ackleson, 2005; Bochaton, 2014; Chaderopa, 2013; Lamb, 2014), serta pada pembahasan mengenai administrasi perbatasan (Baird & Cansong, 2017; Cons & Sanyal, 2013; Opananon & Kitthamkesorn, 2016).

Keamanan Manusia: Perluasan Objek Rujukan Kajian Keamanan

Di tengah banyaknya tulisan-tulisan akademisi yang mengangkat tema perbatasan, hal ini ternyata masih menyisakan ruang di mana fokus eksplorasi kajian mengenai tema perbatasan masih bisa digali lebih dalam. Salah satu ruang eksplorasi tersebut adalah kajian perbatasan dengan sudut pandang keamanan manusia. Sebelum lebih jauh mengeksplorasi konsep ini dalam konteks HI, maka penjelasan konsep keamanan sebagai dasar dari pengembangan studi keamanan perlu dilakukan terlebih dahulu. Dalam studi HI, konsep keamanan yang sering dirujuk adalah formulasi konsep oleh Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *People, State and Fear*, yaitu: "*security, in any object sense, measures the absence of threat to acquired values, in subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*" (Buzan, 1991: 4). Keamanan merupakan salah satu fokus perhatian yang ingin dicapai oleh semua pihak, baik entitas negara maupun individu. Hal inilah yang membuat isu dan kajian tentang keamanan menjadi

dominan dalam studi HI. Pada awal kemunculannya, studi HI memang kerap kali berfokus pada kajian-kajian tentang keamanan nasional sebuah negara dalam politik internasional. Aplikasi konsep keamanan kemudian didominasi oleh perilaku negara dalam mengantisipasi ancaman keamanan nasionalnya dengan menggunakan pendekatan militer, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dunia pada saat ini yang berlatar perang dingin. Pasca perang dingin, kondisi keamanan dunia mengalami perubahan signifikan yang berimplikasi transformasi isu dan aktor dalam hubungan internasional, termasuk pada konsepsi keamanan.

Studi keamanan kemudian mengalami transformasi, jika pada awalnya konsep keamanan dimaksudkan sebagai kajian tradisional tentang keamanan nasional yang bersifat militeristik maka dalam perkembangannya studi keamanan juga mulai memasukan isu-isu non-tradisional seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kekerasan struktural, dan konflik sosial-budaya (Booth, 1991).

Isu keamanan non-tradisional mulai mengemuka pada akhir dekade 1990-an ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan mahzab Kopenhagen seperti Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde mencoba memasukkan aspek-aspek di luar hirauan tradisional kajian keamanan—seperti misalnya masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam, dan sebagainya—sebagai bagian dari studi keamanan (Hadiwinata, 2007). Secara tegas kelompok pemikir ini mencoba memperluas objek rujukan isu keamanan yang tidak hanya mendiskusikan keamanan negara, tetapi juga mulai membahas tentang keamanan manusia.

Keamanan manusia menjadi perhatian serius di seluruh dunia dan konsep ini berkembang dalam diskursus keamanan. Berbeda dengan wacana tradisional yang lebih menekankan pada keamanan negara, wilayah, atau pemerintahan tertentu, konsep keamanan manusia terfokus pada keamanan individu dan masyarakat. Singkatnya konsep keamanan manusia selalu menempatkan individu sebagai sentral objek dalam wacana, analisis, dan kebijakan (Nishikawa, 2010), yang juga meliputi prinsip-prinsip nilai seperti martabat, kesetaraan, dan solidaritas.

Gagasan tentang keamanan manusia, bagaimanapun, tunduk pada berbagai interpretasi. Kadang-kadang menekankan pada keselamatan orang (misalnya kebebasan dari ancaman terhadap kehidupan seperti yang disebabkan oleh konflik bersenjata), sementara di lain waktu, kondisi hidup orang (misalnya penghapusan kemiskinan dan keterbelakangan) atau martabat (misalnya promosi nilai-nilai kemanusiaan dan hak). Sebagai sebuah gagasan, keamanan manusia pertama kali diperkenalkan di arena internasional melalui publikasi Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 1994. Keamanan manusia didefinisikan secara luas sebagai "kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan" dan ditandai sebagai keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan serta perlindungan dari gangguan mendadak dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari—baik di rumah, dalam pekerjaan, atau dalam masyarakat (UNDP, 1994: 23). Pendekatan yang berpusat pada keamanan individu oleh UNDP kemudian dikembangkan dengan tujuh komponen universal dan saling bergantung satu sama lain, yaitu; ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat, dan keamanan politik (Tadjabkhsh & Chenoy, 2007).

Keamanan Manusia: Respon terhadap Perubahan dalam Hubungan Internasional

Secara historis, pendekatan keamanan manusia merupakan sebuah upaya untuk merespon kebutuhan dalam mengatasi perubahan besar dalam hubungan internasional. Konsep keamanan manusia berevolusi pada saat terjadinya pergeseran besar dalam dunia internasional: disintegrasi Uni Soviet yang mengakhiri perang dingin yang kemudian meninggalkan bayang-bayang politik bipolar yang mengaburkan praktik hubungan internasional selama berabad-abad, namun membuka jalan bagi pengakuan terhadap munculnya ancaman-ancaman baru dan konflik yang tak terselesaikan. Pada saat yang bersamaan, globalisasi mengubah aturan internasional dalam memfasilitasi arus cepat kapital dan

teknologi yang mampu menembus batas-batas nasional. Aktor-aktor non-negara baru muncul memainkan peran penting dalam sistem politik internasional, beberapa muncul sebagai ancaman dan beberapa sebagai jembatan antarkomunitas dan bangsa. Dalam situasi seperti ini, peran negara mulai tereduksi dan terus mengalami transformasi, secara tradisional diterima sebagai konsepsi kuasa yang terus diperebutkan. Pergeseran ini kemudian membutuhkan pemikiran baru yang dapat mengatasi masalah terkait persoalan klasik pembangunan dan keamanan. Maka dengan begitu teorisasi keamanan manusia adalah sebuah upaya yang dikembangkan ke arah tersebut.

Dua kekuatan adidaya pada saat perang dingin (Amerika Serikat dan Uni Soviet) terus mendominasi politik dunia dan hubungan internasional hingga terbangun pola persaingan antara keduanya. Akan tetapi, memasuki tahun 1990 kondisi dunia telah berubah: tidak ada lagi komunisme, tidak ada lagi Uni Soviet, tidak ada lagi perlombaan senjata, tidak ada lagi rivalitas kuasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Angin perubahan telah menghantam Uni Soviet dan kebanyakan negara di berbagai belahan dunia. Segalanya tampak mungkin; perdamaian saat ini menjadi sebuah realitas yang tak diinginkan. Konsep keamanan manusia muncul dalam lingkungan seperti ini. Dunia berada di persimpangan, dan peta jalan akan pembangunan internasional sedang berada dalam permintaan yang tinggi. Pada tahun 1994, UNDP yang pertama kali mentransformasi konsep keamanan manusia dari ide tradisional tentang keamanan yang berfokus pada keseimbangan dan kapabilitas militer menuju konsep yang juga memasukkan ide tentang keselamatan dari ancaman kronis seperti: kelaparan, penyakit, dan penindasan sebagaimana halnya perlindungan dari gangguan yang sifatnya mengejutkan dan menyakitkan dalam pola kehidupan manusia sehari-hari. Konsep keamanan manusia juga menyisipkan ide-ide tentang keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

Dalam perkembangannya, keamanan manusia menjadi kata kunci. Bahkan banyak negara seperti Kanada dan Jepang telah menyatakan bahwa keamanan manusia menjadi prinsip panduan bagi kebijakan luar negeri mereka. Dalam kondisi perkembangan dunia yang terus mengglobal, ancaman menjadi praktik yang bersifat transnasional dan negara semakin kehilangan kuasa, isu keamanan tidak bisa lagi dipelajari dengan satu dimensi pengetahuan saja. Sebagai gantinya masalah keamanan harus dikonseptualisasi dari berbagai disiplin ilmu dengan mempertimbangkan beberapa variabel serta interaksinya.

Keamanan manusia adalah konsep yang membongkar makna 'keamanan' dari konsep tradisionalnya, yaitu pengamanan negara dari ancaman-ancaman militer menjadi pengamanan orang dan komunitas. Hingga saat ini, keamanan manusia memang bukan sebuah konsep tunggal. Konsep dan definisi tentang keamanan manusia datang dari berbagai kalangan dan kelompok seperti organisasi internasional, lembaga regional, dan aktor negara yang mendiskusikannya di berbagai forum dan konferensi internasional. Uni Eropa, Kanada, Jepang, UNDP, dan para akademisi datang dengan beragam definisi, mulai dari pandangan sempit seperti pencegahan dari aksi kekerasan sampai pada pandangan komprehensif bahwa pembangunan, HAM, dan keamanan tradisional telah menjadi kebutuhan bersama seluruh umat manusia di muka bumi.

Konsepsi keamanan manusia memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi keamanan. Premis yang ditawarkan dalam konsepsi keamanan manusia berfokus pada eksistensi individual, namun secara lebih luas konsepsi ini juga mencakup hal-hal berkaitan dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai seperti perlindungan terhadap martabat, persamaan, dan solidaritas individu. Berangkat dari ide ini maka dapat disimpulkan bahwa konsep keamanan manusia diformulasi sebagai bentuk reaksi terhadap ide tradisional dari kaum realis (dalam studi HI) yang meletakkan keamanan nasional sebagai fokus perhatian. Konsep keamanan tradisional menekankan pada keamanan negara dari ancaman-ancaman eksternal yang militeristik. Konsep keamanan manusia sebaliknya fokus pada keamanan

individu dan perlindungannya dari berbagai macam ancaman baik yang bersifat militer dan kekerasan kriminal maupun ancaman kelaparan dan wabah penyakit.

Paradigma tradisional tersebut kemudian coba diimbangi dengan paradigma baru yang bersumber dari perluasan objek rujukan keamanan (*referent objects of security*). Keamanan manusia menggeser objek rujukan keamanan dari paradigma tradisional yang semula adalah negara menjadi individu. Selain itu, konsep tersebut juga memperluas definisi 'keamanan' dari yang hanya menitikberatkan pada keberlangsungan hidup (*survival*) menjadi pada dimensi kelayakan hidup serta perlindungan terhadap martabat hidup manusia. Dengan demikian, yang berubah signifikan adalah cara pandang terhadap sumber ancaman serta objek yang ingin diamankan. Sebagai contoh, kemiskinan dianggap sebagai ancaman bagi keamanan manusia karena kemiskinan mengancam kelayakan serta martabat hidup manusia, meskipun kemiskinan juga bisa dipandang sebagai ancaman untuk keberlangsungan suatu negara karena kemiskinan bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan perpecahan dan mengancam stabilitas suatu negara. Jadi, satu ancaman yang sama bisa dipandang melalui lensa yang berbeda.

Hal lain yang membuat keamanan manusia menjadi konsep yang layak untuk dijadikan sebagai agenda internasional adalah perkembangan isu-isu global yang muncul pasca Perang Dingin. Dengan semakin terkoneksi negara-negara di dunia, maka sumber-sumber ancaman baru bermunculan dan bersifat lintas batas, sehingga paradigma keamanan tradisional tidak mampu untuk mengikuti perkembangan yang ada. Kondisi-kondisi inilah yang semakin membuat konsep keamanan manusia diterima sebagai agenda bagi aktor-aktor internasional bukan hanya negara, namun juga INGO yang ada di dunia (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Keamanan Kemanusiaan sebagai Pendekatan dalam Studi Perbatasan Negara

Konsep keamanan manusia merujuk pada pergeseran fokus pembangunan serta keamanan tradisional yang menitikberatkan pada angka-angka maupun statistik formal. Dalam kaitannya dengan pembangunan, konsep ini mendukung tujuan dari pembangunan sebagaimana yang dilaksanakan oleh negara-negara di dunia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun, paradigma pembangunan yang dianut oleh banyak negara di dunia lebih cenderung merefleksikan pandangan tradisional yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada pada strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan, pada tahun 1980-an muncul strategi pembangunan baru yaitu pembangunan berwawasan manusia (*people centered development*). Ada dua pandangan dalam konteks pembangunan ini yaitu: pertama, pengembangan berwawasan produksi (*production centered development*) yang lebih menempatkan manusia sebagai instrumen atau objek pembangunan. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada produktivitas di mana kemakmuran yang melimpah dan 'si miskin' menerima secara pasif. Kemudian manusia dipandang sebagai faktor produksi saja dan mengabaikan manusia lainnya. Kedua, pembangunan berwawasan manusia (*people centered development/human centered development*) yang menekankan pentingnya penguatan (*empowerment*) manusia yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia (Korten, 1987; Tjokroaminoto, 1996).

Paradigma pembangunan berwawasan manusia menjangkau dimensi yang lebih luas dari sekadar membentuk manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan. Manusia diletakkan sebagai inti dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus berasal dari manusia, dilakukan oleh manusia, serta untuk kepentingan manusia. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek dalam proses pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan melalui pemberdayaan.

Logika yang melandasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunan yang utama adalah informasi prakarsa yang kreatif yang tidak pernah habis, dan tujuannya adalah perkembangan manusia dalam arti aktualisasi yang optimal dari potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu, bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek/pelaku (*actors*) yang menentukan tujuan, menguasai sumber daya dan mengarahkan proses yang menentukan hidupnya. Oleh karena itu, paradigma ini memberikan tempat yang paling tinggi bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, serta pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (Korten, 1987).

Pada perkembangannya, paradigma pembangunan berwawasan manusia menjadi pendekatan yang formal dan diadopsi pada tingkat internasional dengan dikeluarkannya UNDP *Human Development Report* pada tahun 1994. Dalam dokumen tersebut, konsep keamanan manusia pertama kali diperkenalkan oleh Mahbub Ul-Haq mantan menteri keuangan dan ekonomi Pakistan serta penyusun *Human Development Report*. Konsep keamanan manusia dipandang sebagai “*natural extension of development in the security field*” (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Pada gilirannya, konsep keamanan manusia menambahkan hal baru dalam perdebatan tentang keamanan dengan merumuskan pertanyaan baru terhadap pertanyaan yang umum ditanyakan dalam studi keamanan, yakni pertanyaan tentang keamanan siapa? Keamanan dari apa? dan Keamanan melalui apa? Pada pertanyaan pertama, konsep keamanan manusia menempatkan manusia (individu) sebagai jawabannya. Meski demikian, konsep ini tidak serta merta mengabaikan keamanan negara ataupun komunitas, hanya saja menitikberatkan pada keamanan manusia secara holistik, jadi keamanan negara atau komunitas tetap diakomodir sepanjang itu berkaitan dengan keamanan manusia. Konsep ini memandang manusia sebagai aktor yang setara dengan aktor-aktor lainnya di HI dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang keamanan negara sebagaimana yang ada dalam paradigma keamanan tradisional. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, konsep keamanan manusia menawarkan perluasan sumber dan bentuk ancaman sehingga mengakomodir ancaman yang bersifat terlihat dan tidak terlihat, objektif dan subjektif, serta ancaman yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Secara garis besar, konsep keamanan manusia mengidentifikasi adanya tiga macam ancaman yakni ancaman sosial ekonomi, ancaman keamanan personal, dan ancaman lingkungan. Pada perkembangannya, dalam *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1994 mengidentifikasi adanya tujuh komponen dari keamanan manusia yakni: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Ketujuh komponen keamanan manusia itu juga bisa diartikan sebagai sumber ancaman bagi keamanan manusia. Dan untuk pertanyaan terakhir, konsep keamanan manusia menawarkan cara untuk memenuhi keamanan bagi manusia dengan jaringan-jaringan terkoneksi dan saling tergantung pada tingkatan global. Hal ini karena sumber ancaman yang diidentifikasi bersifat lintas batas sehingga penanganannya pun membutuhkan kebijakan pada tingkat global.

Dengan diterimanya konsep keamanan manusia sebagai agenda internasional, maka hal ini turut berpengaruh pada bidang akademik. Saat ini banyak terdapat kajian yang mengulas mengenai konsep keamanan manusia dan kaitannya dengan politik global (lihat Black, MacLean, & Shaw, 2006; den Boer & de Wilde, 2008; Neil MacFarlane & Khong, 2006; K. O'Brien, St. Clair, & Kristoffersen, 2010; Roberts, 2010). Dalam konteks kajian perbatasan, konsep keamanan manusia menawarkan alternatif bagi konsep pembangunan negara yang berorientasi pada manusia dan dalam konteks pembahasan mengenai perbatasan, maka konsep ini bisa membantu untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan pembangunan perbatasan yang lebih berorientasi pada manusia (*people oriented*) (Ackleson, 2003; Ajdari & Asgharpour, 2011; Busumtwi-Sam, 2008; Kester, 2017; Shibuya, 2016). Pembangunan dengan paradigma keamanan manusia bisa melengkapi diskursus mengenai pembangunan perbatasan khususnya bagi negara-negara berkembang. Selain itu, paradigma ini juga bisa melengkapi agenda

penelitian perbatasan negara yang selama ini didominasi oleh corak-corak tradisional yang berkisar pada konsep-konsep seperti kedaulatan, militerisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan permasalahan tentang kewarganegaraan (Eilenberg, 2012, 2014, 2015, 2016; Eilenberg & Wadley, 2009).

KESIMPULAN

Karena konsep keamanan manusia dianggap sebagai ekstensi program pembangunan pada isu keamanan, maka konsep tersebut menggugat paradigma tradisional yang selama ini digunakan dalam studi-studi tentang keamanan. Pada studi keamanan secara tradisional, negara merupakan aktor sentral dan menjadi titik tekan pembahasan. Selain itu, negara juga menjadi objek sasaran keamanan (*referent object of security*) di mana segala upaya dan kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan ditujukan untuk mengamankan negara. Oleh karenanya, isu-isu mengenai kedaulatan dan keberlangsungan (*survival*) negara menjadi pusat perhatian dalam paradigma ini. Kemudian persepsi mengenai ancaman terhadap negara diidentifikasi melalui ancaman-ancaman militer seperti agresi negara lain, perang nuklir, aneksasi wilayah teritorial, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari deskripsi tersebut bahwa paradigma keamanan tradisional sangat dipengaruhi oleh pemikiran realisme dan neo-realisme dalam studi HI yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam interaksi politik internasional. Tulisan ini menegaskan bahwa keamanan manusia sebagai faktor penting dalam studi perbatasan negara. Upaya perlindungan terhadap keamanan manusia membuka peluang bagi wilayah perbatasan untuk mempercepat proses pembangunan, dengan keterkaitan yang erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Pendekatan keamanan manusia perlu diintegrasikan sebagai inti proses perencanaan dan implementasi pembangunan wilayah perbatasan yang berbasis pada pembangunan manusia. Keamanan manusia sebagai salah satu pilihan cara yang dapat diterapkan dalam mengelola wilayah perbatasan, terutama dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan negara dengan menitikberatkan pada keamanan manusianya.

REFERENSI

- Ackleson, J. (2003). Directions in Border Security Research. *Social Science Journal*, 40(4), pp. 573–581. [https://doi.org/10.1016/S0362-3319\(03\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0362-3319(03)00069-7)
- Ackleson, J. (2003). Directions in Border Security Research. *Social Science Journal*, 40(4), pp. 573–581. [https://doi.org/10.1016/S0362-3319\(03\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0362-3319(03)00069-7)
- Ackleson, J. (2005). Constructing Security on the U.S.-Mexico Border. *Political Geography*, 24(2), pp. 165–184. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2004.09.017>
- Agnew, J. (1994). The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory. *Review of International Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/09692299408434268>
- Ajdari, B., & Asgharpour, S. E. (2011). Human Security and Development, Emphasizing on Sustainable Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 19, pp. 41–46. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.105>
- Aker, J. C., Klein, M. W., O'Connell, S. A., & Yang, M. (2014). Borders, Ethnicity and Trade. *Journal of Development Economics*, 107, pp. 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.10.004>
- Albert, M., & Brock, L. (2001). What Keeps Westphalia Together? Normative Differentiation in the Modern System of States. In M. Albert, D. Jacobson, & Y. Lapid (Eds.), *Identities, Borders, Orders Rethinking International Relations Theory*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Anderson, M. (1996). *Frontiers: Territory and State Formation in the Modern World*. Cambridge: Polity Press.
- Andreas, P. (2003). Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-first Century. *International Security*. <https://doi.org/10.1162/016228803322761973>
- Atzili, B. (2012). *Good Fences, Bad Neighbors: Border Fixity and International Conflict*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Baird, I. G., & Cansong, L. (2017). Variegated Borderlands Governance in Dehong Dai-Jingpo Autonomous Prefecture along the China-Myanmar Border. *Geoforum*, 85(July), pp. 214–224.

- <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.07.026>
- Bechev, D., & Nicolaidis, K. (2010). Introduction: Frontiers, Memory and Conflict in the Mediterranean. In D. Bechev & K. Nicolaidis (Eds.), *Mediterranean Frontiers. Borders, Conflict and Memory in a Transnational World* (pp. 1–11). New York: Tauris Academic Studies.
- Black, D., MacLean, S., & Shaw, T. (2006). A Decade of Human Security: What Prospect for Global Governance and New Multilateralisms? In D. Black, S. MacLean, & T. Shaw (Eds.), *A Decade of Human Security: Global Governance and New Multilateralisms*. Burlington: Ashgate.
- Bochaton, A. (2014). Cross-border Mobility and Social Networks: Laotians Seeking Medical Treatment along the Thai Border. *Social Science and Medicine*, 124, pp. 364–373.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.10.022>
- Boeije, H. (2010). *Analysis in Qualitative Research*. London: Sage Publication, Ltd.
- Busumtvi-Sam, J. (2008). Contextualizing Human Security: A “Deprivation-Vulnerability” Approach. *Policy and Society*, 27(1), pp. 15–28. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2008.07.002>
- Castanho, R. A., Vulevic, A., Cabezas Fernández, J., Fernández-Pozo, L., Naranjo Gómez, J. M., & Loures, L. C. (2017). Accessibility and Connectivity – Movement between Cities, as a Critical Factor to Achieve Success on Cross-border Cooperation (CBC) Projects: A European analysis. *Sustainable Cities and Society*, 32(March), pp. 181–190. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.03.026>
- Castells, M. (2010a). *End of Millenium. Cambridge MA and Oxford UK Blackwell*. Oxford: Blackwell Publisher. <https://doi.org/10.1002/9781444318234>
- Castells, M. (2010b). *The Power of Identity. The Information Age Economy Society and Culture* (Second Ed., Vol. 2). Oxford: Blackwell Publisher. <https://doi.org/10.1002/9781444318234>
- Castells, M. (2010c). *The Rise of the Network Society. Massachusetts: Blackwell Publishing* (Second Edi, Vol. 1). Oxford: Blackwell Publisher. <https://doi.org/10.2307/1252090>
- Chaderopa, C. (2013). Crossborder Cooperation in Transboundary Conservation-Development Initiatives in Southern Africa: The role of Borders of the Mind. *Tourism Management*, 39, pp. 50–61.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.04.003>
- Clad, J. (2011). Delineation and Borders in Southeast Asia. In J. Clad, S. M. McDonald, & B. Vaughn (Eds.), *The Borderlands of Southeast Asia: Geopolitics, Terrorism, and Globalization*. Washington D.C: National Defense University Press.
- Cons, J., & Sanyal, R. (2013). Geographies at the Margins: Borders in South Asia: an Introduction. *Political Geography*, 35, pp. 5–13. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2013.06.001>
- Coyle, J. J. (2018). *Russia's Border Wars and Frozen Conflicts*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-52204-3>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach*. USA: Sage Publication, Ltd.
- Diener, A., & Hagen, J. (2010). Borders, Identity, and Geopolitics. In A. Diener & J. Hagen (Eds.), *Borderlines and Borderlands: Political Oddities at the Edge of the Nation-state*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Eilenberg, M. (2012). The Confession of a Timber Baron: Patterns of Patronage on the Indonesian–Malaysian Border. *Identities*, 19(2), pp. 149–167. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2012.672841>
- Eilenberg, M. (2014). Frontier Constellations: Agrarian Expansion and Sovereignty on the Indonesian–Malaysian Border. *Journal of Peasant Studies*, 41(2), pp. 157–182.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2014.885433>
- Eilenberg, M. (2015). Shades of Green and REDD: Local and Global Contestations over the Value of Forest versus Plantation Development on the Indonesian Forest Frontier. *Asia Pacific Viewpoint*, 56(1), pp. 48–61. <https://doi.org/10.1111/apv.12084>
- Eilenberg, M. (2016). A State of Fragmentation: Enacting Sovereignty and Citizenship at the Edge of the Indonesian State. *Development and Change*, 47(6), pp. 1338–1360.
<https://doi.org/10.1111/dech.12272>
- Eilenberg, M., & Wadley, R. L. (2009). Borderland Livelihood Strategies: The Socio-economic Significance of Ethnicity in Cross-Border Labour Migration, West Kalimantan, Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 50(1), pp. 58–73. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2009.01381.x>
- Goemans, H. E. (2006). Bounded Communities: Territoriality, Territorial Attachment, and Conflict. In M.

- Kahler & B. F. Walter (Eds.), *Territoriality and Conflict in an Era of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gunay, C., & Witjes, N. (2017). Introduction. In C. Gunay & N. Witjes (Eds.), *Border Politics. Defining Spaces of Governance and Forms of Transgressions* (p. 1). Gewerbestrasse: Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-46855-6>
- Hammarlund, P. A. (2005). *Liberal Internationalism and the Decline of the State: The Thought of Richard Cobden, David Mitrany and Kenichi Ohmae*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hayakawa, K. (2017). Domestic and International Border Effects: The Cases of China and Japan. *China Economic Review*, 43(26285058), pp. 118–126. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.01.014>
- Hermawan, P. Y. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- William, Z. I. (2010). Identity, Movement, and Response. In Z. I. William (Ed.), *Understanding Life in the Borderlands: Boundaries in Depth and in Motion*. Georgia: The University of Georgia Press.
- Jones, R., Johnson, C., Brown, W., Popescu, G., Pallister-Wilkins, P., Mountz, A., & Gilbert, E. (2017). Interventions on the State of Sovereignty at the Border. *Political Geography*, 59, pp. 1–10.
<https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.02.006>
- Kester, J. (2017). Energy Security and Human Security in a Dutch Gasquake Context: A Case of Localized Performative Politics. *Energy Research and Social Science*, 24, pp. 12–20.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.12.019>
- Korten, D. C. (1987). Third Generation NGQ Strategies : A Key to People-centered Development, 15, pp. 145–159.
- Lamb, V. (2014). “Where is the Border?” Villagers, Environmental Consultants and the “Work” of the Thai-Burma Border. *Political Geography*, 40, pp. 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2014.02.001>
- Medeiros, E. (2017). Cross-border Cooperation in Inner Scandinavia: A Territorial Impact Assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 62, pp. 147–157.
<https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.09.003>
- Minghi, J. V. (1963). Boundary Studies in Political Geography. *Annals of the Association of American Geographers*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1963.tb00457.x>
- Neil MacFarlane, S., & Khong, Y. F. (2006). *Human Security and the UN : A Critical History*. Bloomington: Indiana University Press.
- Newman, D. (2001). Boundaries, Borders, and Barriers: Changing Geographic Perspectives on Territorial Lines. Dalam M. Albert, D. Jacobson, & Y. Lapid (Eds.), *Identities, Borders, Orders Rethinking International Relations Theory*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- O'Brien, K., St. Clair, A. L., & Kristoffersen, B. (2010). *Climate Change, Ethics and Human Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Brien, R. (1992). *Global Financial Integration: the End of Geography*. London: Royal Institute of International Affairs.
- Ohmae, K. (1995). *The End of the Nation State: The Rise of the Regional Economies*. New York: The Free Press.
- Ohmae, K. (2005). *The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in our Borderless World*. New Jersey: Wharto School Publishing. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00071_3.x
- Opasanon, S., & Kitthamkesorn, S. (2016). Border Crossing Design in Light of the ASEAN Economic Community: Simulation Based Approach. *Transport Policy*, 48, pp. 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.009>
- Paasi, A. (2005). Generations and the “Development” of Border Studies. *Geopolitics*.
<https://doi.org/10.1080/14650040500318563>
- Perkmann, M., & Sum, N. L. (2001). Globalization, Regionalization and Cross-Border Regions: Scales, Discourses and Governance. In M. Perkmann & N.L. Sum (Eds.), *Globalization, Regionalization, Cross-Border Regions* (pp. 3–21). New York: Palgrave Macmillan.
- Prescott, V., & Triggs, G. D. (2008). *International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography*.
<https://doi.org/10.1163/ej.9789004167858.i-504>
- Roberts, D. (2010). *Global Governance and Biopolitics: Regulating Human Security*. New York: Zed Books.
- Shibuya, K. (2016). Protecting Human Security: Proposals for the G7 Ise-Shima Summit in Japan. *The*

- Lancet*, 387(10033), pp. 2155–2162. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30177-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30177-5)
- Shneiderman, S. B. (2013). Himalayan Border Citizens: Sovereignty and Mobility in the Nepal-Tibetan Autonomous Region (TAR) of China Border Zone. *Political Geography*, 35, pp. 25–36. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2013.04.001>
- Sudiar, S. (2013). *Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security: Concepts and Implications*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203965955>
- Tjokroaminoto, M. (1996). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- van Houtum, H., Kramsch, O., & Zierhofer, W. (2005). Prolouge. In H. van Houtum, O. Kramsch, & W. Zierhofer (Eds.), *B/Ordering Spaces*. Burlington: Ashgate.
- van Houtum, H. (2005). The Geopolitics of Borders and Boundaries. *Geopolitics*. <https://doi.org/10.1080/14650040500318522>